

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**JASA PERKREDITAN BKK DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT**



Oleh
Medi Tri Purwanto, SE., MM
NIDN. 0626057702

**PUSAT PENELITIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA MANGGALA
BREBES
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Jasa Perkreditan BKK Dalam Upaya Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat

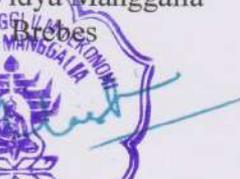
Peneliti :
1. Nama : Medi Tri Purwanto, SE., MM
2. NIDN : 0626057702
3. Unit Kerja : STIE Widya Manggalia

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan dari 4 September s/d 4 Desember 2020
Tempat penelitian : BKK Kabupaten Brebes
Sumber Dana Penelitian :
1. LPPM STIE Widya Manggalia : Rp. 500.000,00
2. Peneliti : Rp. 500.000,00
Jumlah : Rp. 1.000.000,00

Disahkan dan disetujui
Pada tanggal :

Mengetahui

Ketua
STIE Widya Manggalia
Brebes



Magdalena I. Senduk, SH., MM.
NIPY. 160900031

Ketua LPPM



Medi Tri Purwanto, SE., MM.
NIDN. 0626057702



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALIA

Kampus : Jl. Taman Siswa KM. 1 Padasugih - Brebes Telp. (0283) 6176255

website : <http://www.stiewidyamanggalia.ac.id>

TERAKREDITASI B BAN PT SK. No. 3521/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

SURAT TUGAS

NOMOR : 003/PPPM/STIE/IX/A-2020

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia Menugaskan Kepada :

Nama : Medi Tri Purwanto, SE., MM
NIDN : 0626057702
Jabatan : Dosen Tetap

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian sebagai berikut :

Waktu : 5 September s/d 5 Desember 2020
Tempat : BKK Kabupaten Brebes
Judul Penelitian : Jasa Perkreditan BKK Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Brebes, 2 September 2020
Ketua



Medi Tri Purwanto, SE., MM
NIDN 0626057702
PPPM

JASA PERKREDITAN BKK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Oleh
Medi Tri Purwanto, SE., MM
Medip2477@gmail.com

Abstrak

Lending is a business activity that dominates the allocation of BKK funds. The use of funds for lending reaches 70% of BKK's business volume. Therefore, BKK's main source of income comes from lending activities in the form of interest yields. The concentration of BKK's efforts in lending was due to several reasons: the nature of the BKK's business which functioned as an intermediary institution between surplus and deficit units. Distribution provides a definite spread so that the amount of income can be estimated. Seeing its position in the field of monetary policy implementation, BKK is a business sector whose activities are most regulated by the government so that BKK in several districts has limited activities. In Indonesia, for example, BKK is not allowed to allocate funds through the capital market by buying and selling shares on the stock exchange. The main source of BKK funds comes from public funds so morally they have to channel it back to the community in the form of credit.

Kata Kunci : Penyaluran Kredit, BKK, Pendapatan

A. Pendahuluan

Dalam pembicaraan kita mengenai peranan BKK dalam hubungannya dengan sistem moneter, kita akan coba melihatnya dari segi ketentuan menurut Undang – Undang yang berlaku dan beberapa keterangan yang dapat kita peroleh dari beberapa literatur.

Kita akan sependapat bila mendengar bahwa nilai uang pada suatu negara merosot sama sekali, sehingga kepercayaan orang terhadap uang negara itu menjadi hilang. Agar supaya kestabilan nilai uang dapat dipertahankan atau setidaknya – tidaknya kemerosotannya tidak sedemikian derasnya dan terus menerus merosot, maka BKK – BKK dilibatkan dalam upaya tersebut. Kita dapat melihat sebuah kalimat yang kita temukan dalam IPKI yang menyatakan “Bank Indonesia mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

Apakah hanya di Indonesia saja ? bagaimana di negara lain ?. Sebuah kalimat yang sempat penulis dapatkan memberikan keterangan bahwa BKK itu bertanggung jawab akan pengurusan likuiditas usahanya dengan kaitannya sendiri. Sekalipun keterangan ini pendek, namun memberikan makna yang bermaksud mendorong nilai uang di negara itu dan dapat menerima bantuan BKK agar nilainya tak merosot. Caranya bila likuiditas dari BKK yang bersangkutan ingin baik, maka uangnya tidak akan dihamburkan karena diharapkan uang tidak banyak beredar di luar, melainkan mengendap di BKK, juga dalam hal debitemnya diusahakan supaya merupakan debitur yang *current*/lancar, sehingga mudah masuknya pembayaran kembali ke BKK. Di sini nampak uang akan tersedot ke BKK dari luar dan peredaran menjadi berkurang. Untuk itu diharapkan pada umumnya agar nilai uang tidak merosot dan harga – harga tidak naik lagi.

Kita akan melihatnya bila hal itu dikaitkan dengan diskonto politik, (tentu dengan restu pemerintah negara yang bersangkutan). Karena faktor penetapan besarnya/tingginya suku bunga itu turut menentukan peredaran uang dan situasi moneter di negara itu. Keterangan yang akan kita lihat ini tidak terlepas daripada mewajibkan BKKnya sendiri dalam memperhatikan baiknya reserve kasnya. Dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar maka tinggi rendahnya suku bunga pun turut mempengaruhinya. Misalnya suku bunga tabungan, sedemikian rendahnya suku bunga yang ditetapkan BKK untuk diberikan kepada penabung, akan sedemikian merosotnya semangat menabung dari masyarakat, karenanya uang akan banyak beredar di luar. Tetapi bila suku bunga tabungan terus meningkat, maka semangat menabung kalangan masyarakat akan terus meningkat pula. Adapun dalam hal tinggi atau rendahnya suku bunga kredit yang ditetapkan oleh BKK juga banyak mendorong kepada berhasil atau tidaknya mengendalikan peredaran uang di masyarakat.

Seandainya BKK menurunkan suku bunga kreditnya, orang atau badan akan senang mempergunakan jasa BKK dalam bidang perkreditannya dan permintaan serta realisasi pengambilan kredit akan meningkat. Situasi yang demikian, memungkinkan bertambahnya peredaran di luar. Tetapi jika BKK meningkatkan tingkat suku bunga kreditnya, orang/badan tidak senang mengambil kredit dan karenanya uang akan mengalir masuk kembali ke BKK dan uang yang beredar di luar akan menurun.

Bila kita hayati agak mendalam maka dalam hal BKK sebagai alat dalam menjaga dan memelihara kestabilan moneter, maka itu sudah termasuk dalam salah satu fungsi BKK.

BKK memberikan jasa akan kebutuhan kredit. Ini pun merupakan satu fungsi daripadanya seperti dinyatakan dalam penegasan BKK Indonesia sebagai pendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan perkreditan merupakan usaha atau gerakan operasional BKK atau Lembaga Keuangan dengan seizin yang berwenang, melayani kepentingan masyarakat akan kebutuhan modal untuk kelancaran perusahaan.

Setiap kredit yang diberikan baik oleh BKK maupun oleh Lembaga Keuangan non BKK diharapkan bermanfaat untuk kedua belah pihak. Maksudnya baik bagi penerima kredit maupun bagi pemberi kredit.

Sekalipun pemberian kredit itu dilandaskan kepada maksud pemberian bantuan, tetapi tidaklah dimaksudkan sebagai tidak perlu dikembalikan oleh penerima kredit sehingga merugikan pemberi kredit. Tetapi, harus berhasil guna bagi penerimanya dan menguntungkan bagi pemberi kreditnya.

Pada kesempatan ini kami akan memperbincangkan 4 (empat) hal, yakni :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan kredit
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya kredit
3. Masalah kebijaksanaan kredit suatu BKK
4. Merumuskan kebijaksanaan kredit suatu BKK

C. Pembahasan

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan kredit

Bila kita menyempatkan diri menoleh kepada cara manusia berusaha atau bekerja, kita akan menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kredit, seperti :

- a. Perkembangan ekonomi negara dan daerah serta pengaruhnya terhadap dunia usaha pada umumnya.
- b. Keadaan/situasi perdagangan pada umumnya dan pengaruh terhadap kehidupan rakyat banyak termasuk petani.
- c. Tingkat kemakmuran manusia yang berpenghasilan tetap.

Secara selang pandang, kita dapat membayangkan, bahwa bila ekonomi negara itu berkembang maka ekonomi daerahnya pun akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan serta pengembangan dunia usaha. Situasi seperti ini sangat memungkinkan permintaan akan kredit menjadi naik dan mendorong kesehatan jalannya perkreditan, baik dalam pelayanan/penyalurannya, maupun dalam pengembaliannya. Pernyataan di atas dilandasi korelasi umum yang mempunyai formulasi $Y = C + S$ yang berarti setiap pengembangan usaha akan menimbulkan pendapatan yang lebih besar dari pada pembelanjanya.

Akan tetapi bila situasi ternyata sebaliknya yaitu mengalami kemerosotan atau kemunduran ekonomi, maka permintaan akan kredit akan menjadi menurun dan jalannya perkreditan akan menjadi tidak sehat. Badan – badan usaha atau pengusaha perseorangan kemungkinan akan menahan diri untuk mengembangkan usahanya, baik dengan modalnya sendiri ataupun dengan kredit BKK. Akibat dari kemerosotan/kemunduran ekonomi, besar kemungkinan pendapatan perusahaan menurun, atau mungkin sekali akan menjadi lebih kecil daripada pembelanjanya, sehingga tidak aneh kalau mengendurkan arus pengembalian kredit, sehingga jalannya perkreditan menjadi kurang atau tidak sehat.

Situasi perdagangan pada umumnya akan memberikan/merupakan refleksi daripada kemajuan atau kemunduran ekonomi. Kita mungkin sering mendengar istilah – istilah “*kepesatan*” atau “*kelesuan*” perdagangan. Kepesatan perdagangan itu mengakibatkan meningkatnya permintaan akan berbagai jenis barang/produk yang mau tidak mau produsen menjadi meningkat kesibukannya dan selanjutnya permintaan dan pembayaran menjadi sangat ramai. Kesibukan tersebut menggerakkan berbagai kegiatan yang menunjang laju perdagangan regional dan bahkan export dan import. Dengan permintaan akan kredit meningkat, pengembalian kredit menjadi lancar pula, akan tetapi dalam keadaan/iklim perdagangan yang lesu dan ditandai dengan perpermintaan yang mnurun, lalu lintas perdagangan dan lalu lintas pembayaran yang melamban, maka akan menurunkan permintaan akan kredit, demikian arus pengembalian kredit akan lambat pula, sehingga jalannya perkreditan menjadi tidak/kurang sehat.

Tingkat kemakmuran manusia yang berpenghasilan tetap (*fixed earner's*) pun berperan pula dalam menunjukkan naik dan turunnya permintaan akan kredit serta kesehatan perkreditan manakala pihak – pihak yang berpenghasilan mempunyai kunci kemakmuran yang cukup tinggi, karena kebutuhan konsumtipnya rata – rata terpenuhi. Permintaan akan kredit mungkin sekali naik, misalkan untuk keperluan perumahan, perabot rumah tangga dan lain – lainnya. Dalam keadaan demikian, arus pengembalian akan lancar dan perkreditan berjalan sehat. Namun bila tingkat kemakmuran mereka menurun, umpamanya karena biaya hidup (karena harga kebutuhan pokok) naik, maka permintaan kredit akan menurun, arus pengembalian kredit akan melambat dan perkreditan menjadi tidak/kurang sehat jalannya.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya kredit

Besar atau kecilnya kredit akan tergantung kepada titik temu kedua pendapat antara pemohon kredit atau pemberi kredit.

a. Menurut pandangan pemohon kredit

- 1) Perlu cukup sampai tersedianya cadangan untuk menutup kekurangan modal bila terjadi kelambatan perputaran/lalu lintas pembayaran.
- 2) Dapat menutup biaya hidup, selama perusahaan belum berproduksi.
- 3) Berapapun besarnya materi jaminan dapat diserahkan.

Terhadap pandangan pemohon kredit, kita perlu meninjaunya sejenak.

Ad. 1. Kecukupan tersedianya modal/kredit

Pemohon kredit berpendapat (secara baik) bahwa modal yang akan diusahakan ada pada tingkat kecukupan. Apakah dalam ukuran kecil ataupun besar. Artinya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Modal tersebut tentu tidak merupakan kredit (pinjaman) seluruhnya, tetapi dalam bagian tertentu terdiri dari modal sendiri (modal pemilik).

Ad. 2. Keperluan biaya hidup

Pemohon kredit mengartikan biaya hidup atau *living cost* (bagi perusahaan perseorangan) atau biaya umum dan administrasi atau *general administrative cost* (bagi suatu badan). Selama industrinya belum atau tidak menghasilkan perlu dapat ditutup dengan kredit atau pinjaman. Untuk dibayar/dicicil mulai sejak industrinya menghasilkan.

Ad. 3. Karena besarnya jaminan materi

Suatu pendapat yang menyatakan bahwa kredit dapat diminta dalam jumlah tertentu yang besarnya ditentukan oleh jaminan materi. Mereka (para pemohon kredit) sangat banyak mendasarkan jumlah/besarnya permohonan kreditnya dengan berpedoman kepada nilai jaminan yang dapat diserahkannya.

b. Menurut pandangan BKK

BKK memandangnya dari tiga segi pula, yaitu :

- 1) Kecukupan modal untuk usaha nasabah
- 2) Biaya – biaya selama belum beroperasi
- 3) Kaitannya dengan jaminan

Yang dapat kita tinjau seperti di bawah ini :

Ad. 1. Kecukupan modal nasabah

Kredit dari BKK itu, dipandang sebagai bantuan dalam mendorong pengembangan usaha nasabahnya, sehingga BKK tidak perlu memandang “seluruh kebutuhan usaha” nasabahnya untuk harus ditutup/dipenuhi dengan kredit dari BKK. Dalam usahanya untuk mendorong perkembangan atau pertumbuhan/peningkatan usaha/industri nasabahnya, BKK perlu membina kemampuan nasabahnya untuk memupuk modal sendiri (modal pemilik).

BKK melihat kewajiban akan kebutuhan dan kecukupan modal untuk usaha nasabahnya dalam pengertian Laba Optimal yang harus dapat dicapai oleh nasabahnya. Karenanya nasabah membina pemupukan modalnya sendiri agar supaya dalam pengerjaan kecukupan modal

usahanya tak perlu lagi dipenuhi BKK seluruhnya, agar tidak terlalu dibebani beban bunga. Juga para BKK berpandangan agar supaya nasabah hanya menggunakan kredit dikala benar – benar diperlukan, sehingga BKK akan memberikan kesempatan menggunakan *AC/Account Current* (perkiraan Rekening Koran), sekalipun BKK menanggung resiko karena tetap menyediakan dananya untuk kepentingan debitur tersebut.

Ad. 2. Biaya – biaya selama belum operasi

Terhadap kemungkinan adanya pembiayaan oleh nasabah selama usahanya belum berproduksi, maka pihak BKK haruslah dapat menghayatinya. Kebutuhannya termasuk ke dalam jumlah kecukupan modal. Selanjutnya BKK akan/dapat mempertimbangkan tenggang waktu pembayaran (*grace periode*). Yang perlu mendapat perhatian kita adalah hendaknya para nasabah dapat menginsafinya bahwa bila pembiayaan yang dibekkan selama berproduksi itu “berlebihan/terlalu besar” akan memberatkan nasabahnya sendiri.

Ad. 3. Kaitannya dengan jaminan

Jaminan itu memang perlu ada, tetapi tidak merupakan tujuan mutlak dan menentukan/dijadikan dasar menentukan besarnya kredit yang akan diberikan BKK. Jaminan merupakan penguat kepercayaan BKK, dan semata – mata untuk kemudian melelangnya pada penghujung perjanjian kredit. Sebenarnya BKK menuntut debitur untuk berlaku setia (jujur).

Terhadap semua pandangan tersebut di atas perlu diperhatikan bahwa BKK harus dapat menghindari itikad tidak baik calon peminjam dalam mengajukan pinjaman/kreditnya, baik untuk tujuan penggunaannya maupun tentang jumlahnya.

3. *Kebijaksanaan kredit*

Dalam menetapkan kebijaksanaan kreditnya, BKK mempunyai pertimbangan – pertimbangan yang menyangkut :

- a. Besarnya kredit – penyediaan dana – penyaluran kredit
- b. Kelancaran kredit dan bunga kredit

Kesemuanya itu bertali kelindang dengan perlindungan terhadap asset BKK itu sendiri.

a. *Mengenai besarnya kredit*

Besarnya/jumlah kredit yang diberikan oleh BKK dari waktu ke waktu sangat tergantung kepada besar atau kecilnya dana yang dapat disalurkan oleh BKK untuk perkreditannya, terutama bila ada “pagu: yaitu plafond yang ditetapkan oleh BKK central. Adapun besar atau kecilnya dana dimaksud akan ada batasnya dan selalu tidak terbatas (*unlimited = ongeliminteer*), sedangkan kebutuhan akan kredit akan menuntut selama manusia terus berusaha atau menjalankan usaha/perniagaannya. Permintaan akan *supply credit* terus mengalir kepada BKK tak ada hentinya apakah tiap hari, tiap minggu atau tiap saat. Keadaan seperti ini meminta perhatian BKK untuk memikirkannya kapan dan bagaimana dan brapa ia akan memberi supply credit itu.

b. *Penyediaan dana untuk penyaluran kredit*

Dengan adanya pagu atau tidak BKK perlu mempersiapkan penyediaan dana untuk pelayanan kredit kepada para pemohon pinjaman.

Dalam hal ini BKK perlu mempunyai kebijaksanaan tersendiri agar nasabah tidak dikecewakan.

Memang perkembangan/pertumbuhan/pemupukan modal sesuatu BKK dengan yang lainnya itu tidak mungkin sama maka dalam penyediaan dana untuk pelayanan/penyaluran kredit pun tidak akan sama besar/jumlahnya, dan yang jelas setiap BKK tidak akan terbatas penyediaan dananya.

Dengan memperhatikan keterangan – keterangan terdahulu. Kita dapat memperkirakan bahwa penyediaan dana untuk penyaluran kredit dapat kita formulasikan dengan :

- 1) Adanya DYT (Dana Yang Tersedia) = Alat Likuid
- 2) Kemungkinan TBMM (Tabungan Masyarakat yang Mungkin Masuk).
- 3) Kemungkinan NRC (*Net receivable Collecting*)
- 4) Kewajiban mempertahankan alat likuid (KMAL).
- 5) Biaya – biaya periodik (BBP).

Dengan demikian formula kemungkinan penyediaan dana untuk penyaluran kredit adalah : $(DYT + TBMM + NRC) - (KMAL + BBP)$.

c. *Kemulusan debitur (pinjaman yang diberikan)*

Manajemen dengan sendirinya berpengharapan supaya semua piutang berjalan lancar. Artinya mulus semenjak penyalurannya sampai diterimanya kembali/pembayarannya kembali dengan tepat waktu, baik pokoknya maupun bunganya. Namun demikian, timbul pertanyaan dibenak kita, apakah harapan tersebut dapat terwujud atau dengan kata lain ditanyakan apakah semua kredit akan mulus.

Sekalipun pertanyaan tersebut amat sulit untuk dapat dijawab “ya” tetapi perumusan untuk mengusahakan supaya perkreditan dapat berjalan semulus mungkin, kita dapat memperhatikan :

- 1) *Dalam manajemen*, menurut prosesnya BKK akan mempunyai rencana perkreditan untuk setiap periode usahanya. Rencana penyaluran kredit sebagai budget pemberian kredit kita dapat menggunakan formula : $(DYT + TBMM + NRC) - (KMAL + BBP)$.
- 2) *Ketepatan analisis kredit*, merupakan salah satu upaya BKK dalam membantu kelancaran jalannya kredit. Sebaliknya kecerobohan/kesembronon analsis akan mendorong analisis kredit akan mendorong kepada kesemrawutan kelancaran perkreditan.

Dengan analisis kredit seharusnya sudah dapat diketahui, bahwa calon peminjam itu adalah orang atau badan yang diurus orang – orang yang jujur, dipercaya, rencana penggunaan kreditnya tidak meragukan, begitu pula jaminannya meyakinkan. Oleh karena itu, sesuatu BKK menghendaki usaha perkreditannya berjalan sebaik – baiknya, selalu melakukan analisis terhadap semua pemohon pinjamannya dengan cermat. Maksudnya ialah agar perkreditannya mulus dan terhindar dari kemungkinan macetnya pengembalian kreditnya.

- 3) *Ketepatan waktu pemberian/penyaluran kredit* akan merupakan salah satu pendorong kelancaran perkreditan, dikarenakan ketepatan guna dari kredit tersebut, sehingga debitur yang bersangkutan dapat menggunakan daya manfaat pinjamannya secara maksimal

Misalkan saja :

- a) Kredit perdagangan, diberikan menjelang musim ramai penjualan karena menghadapi hari – hari tertentu (hari – hari Raya, Tahun Baru, kenaikan Kelas, Panen dan sebagainya).
- b) Kredit pertanian, diberikan menjelang musim garap.
- c) Kredit investasi, diberikan menjelang persaingan menajam dan sebagainya.

Kecermatan dan ketepatan penanganan analisis BKK jualan yang akan membantu ketepatan saat penyaluran kreditnya.

- 4) *Pengawasan (pengendalian) kredit secara efektif*, sangat menentukan lancar atau kurang lancarnya perkreditan sebuah BKK.

Yang dimaksudkan pengawasan tidaklah hanya dilakukan terhadap kredit yang telah diberikan semata – mata, akan tetapi harus berjalan semenjak budget pemberian kredit disusun, analisis kredit, penyaluran kredit, penerimaan kredit sampai kepada pengembaliannya, malahan sampai kepada pengintensifan penagihan (bila perlu).

- a) *Pengawasan secara pasif*, dilakukan melalui tata usaha perkreditan. Manajemen akan mengetahui sampai sejauh mana efektifitas pengawasan secara pasif dilakukan oleh bagian perkreditannya.
- b) *Pengawasan yang aktif*, pengawasan aktif banyak memperhatikan keadaan di lapangan yang menyangkut perilaku kehidupan usaha atau kesetiaan nasabah BKK itu sendiri oleh petugas BKK yang ditugaskan untuk itu.

Janganakan pengawasan menemukan kejanggalan, keanehan atau keistimewaan dalam perkreditan yang dilaksanakan oleh BKKnya, dalam keadaan yang wajarpun pengawas BKK mempunyai kewajiban yang tak langsung dalam turut serta membina usaha para nasabahnya, supaya mereka berkesempatan berusaha berkembang terus sehingga lambat laun tidak tergantung terhadap kredit dari BKK dalam permodalan usahanya. Di balik itu pengawas BKK mempunyai kewajiban yang langsung turut menjaga agar para nasabah tetap mempunyai posisi/kekuatan mengembalikan modal pinjamannya beserta bunganya secara tepat waktu.

Oleh karena itu kualitas debitur sesuatu BKK mau tidak mau harus dapat menerima bila kita katakan dibentuk pula dengan efektifitas pengawas kredit yang dilakukan oleh BKK itu sendiri.

- d. Mengenai bunga kredit

Sekalipun tidak terlalu mutlak, faktor (dalam hal ini tinggi atau rendahnya suku bunga) bunga kredit turut pula mempengaruhi kelulusan perkreditan yang diselenggarakan oleh BKK.

Suku bunga kredit yang rendah mungkin sekali meringankan usaha nasabah, dan usahanya dapat berkembang, karena beban biaya modal pinjamannya rendah, sehingga arus pengembalian pinjaman diharapkan lebih lancar. Bagi BKKnya sendiri boleh jadi (ada yang menganggap) prosentase pendapatannya rendah. Akan tetapi bila skope perkreditannya luas/besar, jumlah pendapatannya akan menjadi besar.

Sebaliknya bila suku bunga kredit sesuatu BKK ditetapkan tinggi (terlalu tinggi) akan dianggap pendapatan BKK (akan) mencapai prosentase yang tinggi pula, lebih – lebih bila skope perkreditannya luas/besar. Namun bila dilihat dari segi nasabah (debitur), tingginya suku bunga kredit itu akan

membebani usahanya, mengakibatkan perusahaannya kurang (tidak) dapat berkembang, sehingga mungkin sekali arus pengembalian kreditnya menjadi tersendat – sendat. Situasi seperti ini, cepat atau lambat akan banyak mempengaruhi pula terhadap perkreditan yang dilaksanakan oleh BKK yang bersangkutan. Kekurangan pesatan usaha nasabah (debitur) (yang disini diumpamakan karena terlalu tingginya suku bunga BKK), menjadi melambatkan arus pengembalian kredit. Artinya akan mengurangi jumlah pengembalian kredit atau lebih rendah dari semula, demikian pula pemasukannya.

Arus pengembalian kredit yang melambat yang mengakibatkan pengembalian kredit menjadi lebih kecil dari estimate dan melambatkan pemasukan bunga, mengakibatkan volume kredit yang disalurkan akan mengecil, dan pendapatan BKK menjadi menciut.

Oleh karena demi kelulusan jalannya perkreditan oleh sesuatu BKK, penetapan suku bunga kreditnya perlu mendapat pertimbangan yang matang.

D. Kesimpulan

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana BKK. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70% dari volume usaha BKK. Oleh karena itu sumber pendapatan utama BKK berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk hasil bunga. Terkonsentrasinya usaha BKK dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan

1. Sifat usaha BKK yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit.
2. Penyaluran memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan.
3. Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijakan moneter, perBKKan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur oleh pemerintah sehingga BKK di beberapa Kabupaten kegiatannya dibatasi. Di Indonesia misalnya BKK – BKK tidak diperkenankan mengalokasikan dananya melalui pasar modal dengan melakukan jual beli saham di bursa efek.
4. Sumber dana utama BKK berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Husnan, S., 1994, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Edisi Ke – 2, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mishkin, Frederick. S., 1992, *The Economics of Money, BKKing and Financial Market*, Third Edition, New York : Harper Collin Publisher.
- Pujo Mulyono, Teguh, 1993, *Manajemen perkreditan Bagi BKK Komersial*, Yogyakarta : BPFE.

- Siamat, Dahlan, 1993, *Manajemen BKK Umum*, Jakarta : Intermedia.
- Sinungan, Muchdarsah, 1994, *Strategi Manajemen BKK Menghadapi Tahun 2000*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- , 1997, *Manajemen Dana BKK*, Jakarta : Bumi Akasara.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1995, *Kelembagaan PerBKKan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardiyo Perry, Zulverdi, Doddy, 1998, *Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia*, Buletin Ekonomi, Moneter dan PerBKKan.